

Indonesia Pasca-Pemilu 2009

Oleh: Mudrajad Kuncoro, Guru Besar Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM

agaimanakah Indonesia pasca-Pemilu 2009? Inilah pertanyaan yang layak dilontarkan pascaterpilihnya para wakil rakyat dan presiden/wapres baru nanti. Apakah visi dari para caleg dan capres benar-benar akan dijalankan sebagaimana dikumandangkan saat kampanye? Tema "perubahan" sebagai kata kunci yang diteriakkan saat kampanye benarkah membawa "perubahan signifikan" di negeri ini?

Dipilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) pada Pemilu 2004 sebagai presiden dan wakil presiden, mencerminkan tingginya harapan rakyat akan perubahan mendasar di Indonesia.

Sejak awal masa pemerintahannya, SBY dan JK telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu rencana pembangunan lima tahunan, berdasarkan visi, misi, dan program prioritas pada saat kampanye menjelang pemilu.

RPJMN ini dituangkan dalam Peraturan Presiden 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 -2009.

RPJMN di era SBY, pada pokoknya berisi tiga agenda nasional yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Agenda tersebut ialah menciptakan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Presiden SBY menegaskan kepeduliannya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Concern tersebut kemudian dirumuskan dengan new deal dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ringkasan dari new deal tersebut tertuang dalam triple track strategy (tiga jalur strategi), yaitu pro-growth, pro-job, dan pro-poor.

Jalur pertama dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan yang mengutamakan ekspor dan investasi. Jalur kedua, menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja. Jalur ketiga, merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan, dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan.

Pertanyaannya, seberapa jauh hasil implementasi triple track strategy dan ketiga agenda utama kebijakan Pemerintah SBY? Ini penting untuk dikaji karena SBY tampaknya akan melanjutkan kebijakan dan program yang dilakukan bila terpilih kembali dalam Pilpres 2009. Sementara bagi capres lainnya, perlu mengkritisi dan mengajukan alternatif roadmap ke mana Indonesia akan dibawa selama 5 tahun ke depan?

"Pro-Growth"

Pola pertumbuhan ekonomi Indonesia belum banyak berubah, masih berciri consumption driven growth (pertumbuhan yang disokong konsumsi), bukan investment-led growth (pertumbuhan karena investasi) sebagaimana diajarkan oleh teori makro konvensional.

Ternyata konsumsi masyarakat plus konsumsi pemerintah merupakan penyumbang terbesar laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2004-2008, baru diikuti oleh investasi dan ekspor neto.

Dari dimensi spasial, Jawa tetap merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia (sekitar 60%). PDB Pulau Jawa didorong secara berurutan oleh sektor industri pengolahan, perdagangan- hotel-restoran, dan sektor pertanian.

Dilihat dari sisi PDRB per kapita per provinsi, terjadi ketimpangan besar. PDRB per kapita yang tinggi terpusat pada daerah provinsi yang kaya sumber daya alam, seperti Kaltim, Riau dan NAD, serta daerah ibukota.

Pola pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mengalami perubahan mendasar jika dilihat dari dimensi sektoral, pengeluaran, dan spasial. Dari dimensi sektoral, pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh beberapa sektor kunci terutama sektor pertanian, industri, dan perdagangan-hotel-restoran. Meskipun mengalami pertumbuhan yang rendah berkisar antara 3,5% hingga 7,7%, industri pengolahan nonmigas masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi antara 24,65% hingga 28,65%.

Dari dimensi pengeluaran, kontribusi masing-masing pengeluaran terhadap PDB tidak terjadi banyak perubahan, masih didominasi oleh konsumsi. Oleh karena itu, dapat dikatakan pola pertumbuhan Indonesia masih bercirikan consumption driven growth.

Pro-Job dan Pro-Poor

Dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran, pada masa Pemerintahan Megawati, rata-rata tingkat kemiskinan mencapai 17,2%, sedangkan pada masa SBY, rata-rata tingkat kemiskinan mencapai 16,5% selama 2005-2008.

Angka pengangguran juga tidak banyak berubah. Pada masa Megawati, rata-rata pengangguran masih berkisar 9%. Relatif tingginya angka pengangguran menunjukkan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pascakrisis, yang di bawah 6,4%, belum mampu menyerap tambahan kesempatan kerja baru dan mengurangi kemiskinan secara substansial.

Meningkatnya volume APBN, harus lebih didorong untuk program yang berkorelasi terhadap penurunan kemiskinan. Hal itu agar peningkatan volume APBN yang 215% lebih, dari Rp 397 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 855 triliun pada tahun 2008, dan anggaran pengentasan kemiskinan yang juga meningkat 282,6% dari Rp 23 triliun tahun 2005 menjadi Rp 65 triliun tahun 2008, bisa lebih berdaya guna.

Quo Vadis?

Setelah sepuluh tahun era reformasi, fokus perhatian para capres perlu diarahkan pada bagaimana mempercepat penurunan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan strategi mengurangi dampak krisis keuangan global. Rakyat perlu mendapat gambaran bagaimana roadmap (peta jalan) dan bagaimana negara ini akan dibawa selama 5 tahun ke depan?

Memimpin dalam situasi krisis global tidaklah sama dengan situasi normal. Krisis menuntut a no-nonsense leader. Artinya, krisis menuntut pemimpin bekerja lebih keras, membuat keputusan yang tepat secara cepat, dan mampu mengimplementasikannya secara tegas, dan itu akan kita lihat hasilnya melalui Pilpres 8 Juli nanti.

Semoga perubahan yang dijanjikan oleh para capres pada saat kampanye tidak hanya sekedar mitos. Sayang sekali bila harapan perubahan yang diinginkan rakyat hanya angin surga yang berembus kencang saat kampanye. Habis pemilu, terbitlah kebangkitan ekonomi Indonesia? *